



DOK ISTIMEWA/JOGLO JOGJA

PRODUKSI PANGAN: Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Sukidi (jongkok, baju putih) di salah satu lahan pertanian di Kota Yogyakarta.

Hanya Mampu Penuhi Beras 1,29 Persen

Kota Yogyakarta Siapkan Raperda Ketahanan Pangan

YOGYAKARTA, Joglo Jogja - Kota Yogyakarta sebagai daerah konsumen. Khususnya, untuk bahan pokok makanan berupa beras. Dari kebutuhan beras sekitar 26.792 ton per tahun, Kota Yogyakarta hanya mampu memenuhi 1,29 persen.

"Kondisi geografis dan lahan pertanian minim. Luas

sawah di Kota Yogyakarta hanya 25 hektare. Kapasitas produksi 340 ton sampai 435 ton per tahun. Itu akan habis dikonsumsi dua setengah hari warga kita," jelas Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Sukidi, Selasa, (16/12/2025).

■ Baca **HANYA...** Hal II

Hanya Mampu Penuhi Beras 1,29 Persen

sambungan dari hal Joglo Jogja

Ia mengatakan, dengan kapasitas yang sangat minim ini, kebutuhan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Ketahanan Pangan sudah cukup mendesak. Sebab, dengan adanya perda ini, masyarakat bisa memaksimalkan lahannya. Juga, jual beli bahan pokok bisa lebih dikendalikan.

"Kota Yogyakarta itu kan Kota Konsumen. Untuk mengalahkan Kota Yogyakarta itu enggak usah diapa-apain. Kalau daerah-daerah penyangga kita enggak memasukkan pangannya ke Kota Yogya, sudah selesai," tegas Sukidi.

Karena itu, Raperda Ketahanan Pangan dirancang sebagai dasar hukum yang dapat mengatur penyelenggaraan ketahanan pangan secara lebih komprehensif dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Salah satu poin penting ialah dorongan agar setiap warga mengoptimalkan ruang yang dimiliki untuk mendukung produksi pangan, termasuk memanfaatkan atap rumah, teras,

atau ruang lain untuk budidaya tanaman.

"Ruang itu tidak harus berupa lahan sawah, tapi ruang apa saja. Bisa kalau rumahnya tingkat di atas bisa dipakai untuk budidaya tanaman," katanya.

Raperda ini juga akan memperkuat pengelolaan *food bank* Lumbung Mataraman. Selama ini program tersebut masih bersifat imbauan, namun ke depan akan menjadi aturan yang mengikat. "Besok kalau Raperdanya sudah jadi, itu menjadi sebuah aturan yang mengikat. Bahkan kami mungkin boleh setengahnya itu boleh memaksa bahwa yang punya pangan lebih bisa kami ambil untuk kami kelola, untuk kami distribusikan kepada yang membutuhkan," ujar Sukidi.

Selain ketersediaan pangan, keamanan pangan juga menjadi perhatian penting. Sukidi menyoroti banyaknya penyakit yang muncul akibat pangan tidak sehat, bahkan pada anak usia SD.

Ia mencontohkan negara lain seperti Malaysia dan Singapura yang menerapkan pembatasan pembelian makanan untuk anak-anak demi kesehatan.

"Ini kenapa? Karena belum ada pengaturan tentang pangan-pangan yang tidak sehat. Anak-anak dengan bebasnya beli chiki begitu saja," jelasnya.

Melalui Raperda Ketahanan Pangan, pihaknya berharap sistem ketahanan pangan dapat dikelola lebih baik dan berkelanjutan, mulai dari produksi, distribusi, keamanan pangan, hingga penguatan akses masyarakat terhadap pangan sehat. Sukidi menegaskan bahwa kebutuhan pangan tidak dapat ditunda, sehingga regulasi yang kuat dan adaptif sangat dibutuhkan.

"Kalau tidak makan tiga hari saja, ini nanti akan merepotkan rumah sakit. Maka ketahanan pangan ini sesuatu yang wajib untuk diadakan, apapun kondisinya," ujarnya. (eri/and/wa)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pertanian dan Pangan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 09 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005